



LAPORAN EVALUASI

RENCANA STRATEGIS(RENSTR)

DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

PERIODE 2025-2030

EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN
2026

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Periode 2025-2029 sampai dengan Tahun 2026 telah disusun sebagai bahan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah serta tindak lanjut perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Uraian	Keterangan
Nama Perangkat Daerah	Dinas Pertanian Kota Denpasar
Periode Renstra	2025-2029
Periode Evaluasi	s.d Tahun 2026
Tanggal Penyusunan	15 September 2026

Ditetapkan di : Denpasar
Tanggal :

Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
NIP. 19671007 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja, menilai efektivitas program, serta mengetahui tingkat keberhasilan implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan sektor pertanian yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Melalui laporan ini, kita dapat melihat sejauh mana target indikator pada Dinas Pertanian Kota Denpasar telah terpenuhi.

Ruang lingkup evaluasi dalam laporan ini mencakup analisis terhadap pelaksanaan program kerja, realisasi anggaran, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta capaian target kinerja sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar 2025-2029. Hasil evaluasi yang tersaji dalam laporan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kota Denpasar memiliki komitmen kuat untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dan catatan kritis yang dihasilkan. Kami akan mengintegrasikan hasil evaluasi ini ke dalam perencanaan program kerja pada tahun berikutnya guna mengoptimalkan pelayanan publik, memperkuat ketahanan pangan kota, dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kota Denpasar.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pertanian Kota Denpasar serta semua pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan program hingga penyusunan laporan evaluasi ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif demi kemajuan pembangunan pertanian perkotaan yang berkelanjutan di Kota Denpasar.

Denpasar, 15 September 2026
Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
NIP. 19671007 199703 1 004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Dasar Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Ruang Lingkup Evaluasi	9
1.5 Metodologi Evaluasi	9
BAB II GAMBARAN RENSTRA DAN ARSITEKTUR KINERJA PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
2.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Renstra	12
2.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	12
2.4 IKU Perangkat Daerah	12
2.5 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung	12
2.6 Pohon Kinerja Perangkat Daerah	15
BAB III HASIL EVALUASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH	16
3.1 Evaluasi Kelengkapan dan Kualitas Indikator Kinerja Utama	16
3.1.1 Kelengkapan Metadata IKU	16
3.1.2 Penilaian Kualitas IKU	16
3.2 Evaluasi Capaian IKU dan Kontribusi terhadap Indikator RPJMD	17
3.2.1 Capaian IKU terhadap Target	17
3.2.2 Analisis Tren Capaian	17
3.2.3 Kontribusi terhadap Indikator RPJMD	17
3.3 Evaluasi Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Mendukung IKU	18
3.4 Evaluasi Keselarasan Hubungan Kinerja dalam Pohon Kinerja	23
3.5 Rekapitulasi Hasil Evaluasi	26
BAB IV PERMASALAHAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA	27
4.1 Permasalahan Pencapaian IKU	27
4.2 Faktor Pendorong	27

4.3 Faktor Penghambat.....	27
4.4 Analisis Gap.....	28
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	29
5.1 Rekomendasi Perbaikan IKU.....	29
5.2 Rekomendasi Target Kinerja.....	29
5.3 Rekomendasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.....	29
5.4 Rekomendasi Perbaikan Pohon Kinerja.....	32
5.5 Rencana Tindak Lanjut.....	32
BAB VI PENUTUP.....	33
6.1 Kesimpulan.....	33
6.2 Tindak Lanjut.....	33
LAMPIRAN.....	34
LAMPIRAN 1. MATRIKS EVALUASI CAPAIAN RENSTRA.....	35
LAMPIRAN 2. MATRIKS METADATA IKU.....	48
LAMPIRAN 3. MATRIKS CASCADING RPJMD - RENSTRA - IKU - INTERVENSI.....	48

CATATAN: Daftar isi dibuat otomatis. Setelah dokumen selesai diisi, pilih seluruh dokumen (Ctrl+A), kemudian tekan F9 atau klik kanan pada daftar isi dan pilih Update Field.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif memuat gambaran singkat hasil evaluasi Renstra dengan fokus pada empat aspek utama: (1) kelengkapan dan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU); (2) capaian IKU dan kontribusinya terhadap indikator RPJMD; (3) kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mendukung pencapaian IKU; serta (4) keselarasan hubungan kinerja dalam pohon kinerja.

Aspek Evaluasi	Temuan Utama	Status	Rekomendasi Singkat
Kualitas IKU dan metadata	Komponen metadata formal tersedia lengkap. Namun, kualitas perumusan IKU lama hanya menghitung kuantitas fisik (tonase) yang tidak lagi realistis akibat masifnya alih fungsi lahan sawah	Perlu Perbaikan	Komponen metadata formal tersedia lengkap. Namun, kualitas perumusan IKU lama hanya menghitung kuantitas fisik (tonase) yang tidak lagi realistis akibat masifnya alih fungsi lahan sawah
Capaian IKU dan kontribusi RPJMD	Capaian berjalan berjalan s/d Agustus 2026 berada pada tren positif (<i>on-track</i>), menyentuh 63,91% untuk pangan/horti dan 64,91% untuk daging. Angka riil ini menjadi pilar utama pembentuk nilai positif Indeks Ketahanan Pangan (IKP) daerah dalam RPJMD	Perlu Perbaikan	Mengoreksi target volume produksi fisik tahunan untuk diturunkan dari tingkat sasaran strategis menjadi indikator operasional sekunder pada tingkat bidang teknis
Kesesuaian program/kegiatan/subkegiatan	Arsitektur program secara operasional selaras. Namun, terdapat ketidaksesuaian regulasi nomenklatur baru (Kepmendagri No. 900.1-861 Tahun 2026) dan adanya amanat akomodasi 4 subkegiatan prioritas baru hasil BA Rakortekbang 2027	Perlu Perbaikan	Menghapus 2 subkegiatan penyuluhan yang tidak berlaku lagi, menggantinya dengan aktivitas Diseminasi Informasi Teknis, serta menambahkan 4 subkegiatan baru amanat pusat
Keselarasan pohon kinerja	Terjadi kelemahan dasar pada penjenjangan (<i>cascading</i>) atas karena target fisik terikat pada bentang lahan yang menyusut, serta memunculkan missing link karena tidak mampu mengukur tingkat keuntungan riil pelaku usaha tani	Perlu Penyempurnaan	Melakukan rekonstruksi total pohon kinerja dengan mengubah rumusan Sasaran Utama dari "Meningkatnya Produksi Pertanian" menjadi "Meningkatnya Pendapatan Petani".

Secara administratif, kondisi capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar sampai dengan bulan Agustus 2026 **dinyatakan berjalan dengan baik dan berada pada jalur yang tepat (*on-track*)** dengan realisasi pangan/hortikultura sebesar **25.297,52 ton** serta produksi daging sebesar **284,78 ton**. Meskipun demikian, potret akuntabilitas jangka panjang instansi terancam tidak optimal akibat kesalahan asumsi perencanaan (*planning fallacy*), di mana target pertumbuhan tonase tahunan terus dipacu di tengah disrupsi riil berupa **degradasi lahan subak produktif yang sangat masif mencapai 256 Hektar** dalam rentang waktu 2025 ke 2026.

Pohon kinerja lama terfragmentasi secara tidak efisien dan belum sensitif terhadap isu fluktuasi biaya operasional petani. Prioritas tindak lanjut utama yang harus segera dilakukan pada **Triwulan IV Tahun Anggaran Perubahan 2026** adalah menetapkan formalisasi dokumen Renstra Perubahan 2025–2029, merestrukturisasi pohon kinerja perubahan berbasis **"Meningkatnya Pendapatan Petani"**, menyelaraskan Perjanjian Kinerja (PK) tahunan, serta menerbitkan Petunjuk Teknis internal untuk penyelenggaraan survei sampling struktur biaya tani tingkat kecamatan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan makro yang mengarahkan kebijakan pembangunan sektor pertanian perkotaan. Untuk memastikan seluruh program kerja berjalan di jalur yang tepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, pelaksanaan evaluasi terhadap Renstra menjadi sebuah keharusan yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Tantangan pembangunan pertanian di wilayah perkotaan saat ini semakin kompleks. Saat ini Kota Denpasar mengalami alih fungsi lahan pertanian yang sangat signifikan, yaitu mencapai 256 Hektar dari tahun 2025 ke tahun 2026. Fenomena ini menjadi disrupsi besar yang secara langsung mengancam stabilitas ketahanan pangan daerah serta capaian target-target makro yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, diperlukan instrumen evaluasi yang tajam untuk menguji efektivitas kebijakan dinas dalam merespons dinamika lapangan tersebut. Evaluasi Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar dilakukan terhadap capaian indikator, kualitas perumusan kinerja, serta keselarasan hubungan kinerja mulai dari sasaran RPJMD, sasaran Renstra Perangkat Daerah, program, kegiatan, hingga subkegiatan. Evaluasi tidak lagi sekadar menempatkan dokumen perencanaan sebagai instrumen administratif belaka. Lebih dari itu, evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk membandingkan target dan realisasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan berkualitas, intervensi yang direncanakan relevan, serta hubungan sebab-akibat antarlevel kinerja tersusun secara logis.

Melalui pendekatan ini, Dinas Pertanian dapat mengukur apakah intervensi program yang dirancang telah adaptif dan mampu memitigasi dampak dari hilangnya lahan pertanian tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan evaluasi Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar sekurang-kurangnya wajib memperhatikan : beberapa hal antara lain :

1. **Kelengkapan dan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU).** Hal ini penting untuk memastikan setiap indikator dapat diukur secara objektif, ilmiah, dan tidak menimbulkan bias dalam pelaporan capaian di tengah berkurangnya luasan lahan. Capaian IKU dan kontribusinya terhadap pencapaian indikator RPJMD. Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mendukung IKU.
2. **Keselarasan hubungan kinerja dalam pohon kinerja (cascading).** Setiap level kinerja dari eselon tertinggi hingga pelaksana subkegiatan harus saling mengikat secara logis dalam hubungan sebab-akibat yang kuat.

Melalui ruang lingkup evaluasi yang komprehensif ini, laporan ini diharapkan mampu mendeteksi celah koordinasi, mengoreksi ketidakselarasan program, serta menyajikan rekomendasi strategis bagi perbaikan perencanaan pertanian Kota Denpasar di masa yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;*
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan terakhirnya;*
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;*
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai tata cara perencanaan, evaluasi, serta klasifikasi nomenklatur pembangunan daerah;*
- 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029*
- 6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029*

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan adalah menyediakan hasil evaluasi yang objektif sebagai dasar pengendalian, perbaikan perencanaan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Pertanian Kota Denpasar. Dokumen ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan berjalan secara efisien dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Tujuan evaluasi adalah:

- 1. Menilai kelengkapan dan kualitas IKU, termasuk definisi operasional, formula/perhitungan, sumber data, dan metadata pendukung;*
- 2. Mengukur capaian IKU terhadap target yang telah ditetapkan;*
- 3. Menilai kontribusi IKU Perangkat Daerah terhadap pencapaian indikator RPJMD;*
- 4. Menilai kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mendukung pencapaian IKU;*
- 5. Menilai keselarasan hubungan kinerja dalam pohon kinerja; dan*

6. *Merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan Renstra, Renja, perjanjian kinerja, serta penganggaran*

1.4 Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar ini difokuskan pada pengujian kedalaman komponen perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi. Adapun batasan ruang lingkup evaluasi sekurang-kurangnya meliputi aspek-aspek berikut:

1. *Kelengkapan dan kualitas IKU serta metadata indikator.*
2. *Capaian IKU dan kontribusinya terhadap indikator RPJMD.*
3. *Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan terhadap pencapaian IKU.*
4. *Keselaran hubungan kinerja dalam pohon kinerja.*

1.5 Metodologi Evaluasi

Untuk menghasilkan penilaian yang objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar ini menerapkan pendekatan deskriptif-kualitatif dan kuantitatif. Adapun instrumen metodologi evaluasi yang digunakan meliputi:

1. Telaah Dokumen (Document Review)

Melakukan pengkajian mendalam terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja formal, antara lain dokumen RPJMD Kota Denpasar 2025–2029, Renstra Dinas Pertanian, Rencana Kerja (Renja) tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pertanian.

2. Analisis Target dan Realisasi

Melakukan perhitungan matematis dan statistik sederhana untuk membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian di lapangan. Analisis ini ditujukan untuk menghitung tingkat capaian kinerja (efektivitas) dan tingkat penyerapan anggaran (efisiensi).

3. Pemeriksaan Metadata Indikator

Melakukan verifikasi dan validasi terhadap kejelasan instrumen indikator. Pemeriksaan difokuskan pada ketersediaan definisi operasional, kepastian formula rumusan perhitungan, keandalan sumber data, serta periode pelaporan untuk memastikan indikator memiliki kualitas ukur yang presisi.

4. Analisis Hubungan Sebab-Akibat Kinerja

Menguji validitas penjenjangan kinerja (cascading) dari level strategis hingga level operasional. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan logikalitas hubungan

vertikal dan horizontal dalam pohon kinerja, sehingga setiap subkegiatan terbukti secara ilmiah berkontribusi pada pencapaian sasaran di atasnya.

5. Analisis Keterkaitan Intervensi

Menganalisis relevansi paket program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang terhadap penyelesaian isu strategis kedinasan. Analisis ini ditujukan untuk menguji apakah intervensi belanja dan aktivitas kerja yang dilakukan dinas benar-benar adaptif dan solutif (misalnya dalam memitigasi dampak alih fungsi lahan seluas 256 Ha).

6. Konfirmasi kepada Unit Pengampu Data/Kinerja

Melakukan teknik triangulasi berupa konfirmasi langsung, wawancara, maupun forum diskusi terarah (Focus Group Discussion) dengan bidang atau unit kerja pengampu data di lingkup Dinas Pertanian Kota Denpasar. Langkah ini diambil apabila diperlukan klarifikasi mendalam mengenai anomali data, kendala lapangan, atau keterlambatan capaian target

BAB II GAMBARAN RENSTRA DAN ARSITEKTUR KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pertanian Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kota.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- 1. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;*
- 2. penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;*
- 3. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;*
- 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;*
- 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan pertanian;*
- 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;*
- 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya*

Struktur organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas;*
- 2. Sekretaris;*

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;

- 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;*
- 2. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;*
- 3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;*
- 4. Bidang Bina Usaha dan Pengolahan;*
- 5. UPTD; dan*
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.*

2.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Renstra

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra PD	IKU PD
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya produksi pertanian	1. <i>Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</i> 2. <i>Produksi Daging</i>

2.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Akhir Renstra
Mewujudkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya produksi pertanian	1. <i>Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</i>	39.537,05 Ton	39.609,59 Ton
		2. <i>Produksi Daging</i>	413,29 Ton	454,72 Ton

2.4 IKU Perangkat Daerah

IKU	Satuan	Baseline	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
<i>Produksi tanaman pangan dan hortikultura</i>	Ton	39.537,05	39.485,28	39.585,93	39.592,19	39.601,64	39.609,59
<i>Produksi Daging</i>	Ton	413,29	434,39	438,74	443,56	448,89	454,72

2.5 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung

IKU	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Penanggung Jawab
<i>Produksi tanaman pangan dan hortikultura</i>	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
<i>Produksi tanaman pangan dan hortikultura</i>	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
<i>Produksi Daging</i>	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
<i>Produksi Daging</i>	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

IKU	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Penanggung Jawab
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Produksi Daging	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	UPTD Rumah Potong Hewan
Produksi Daging	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Produksi Daging	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Produksi Daging	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Produksi Daging	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Produksi Daging	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	UPTD Pusat Kesehatan Hewan

IKU	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Penanggung Jawab
	MASYARAKAT VETERINER	Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil
Produksi Daging	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB III HASIL EVALUASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

3.1 Evaluasi Kelengkapan dan Kualitas Indikator Kinerja Utama

3.1.1 Kelengkapan Metadata IKU

Evaluasi metadata dilakukan untuk memastikan bahwa setiap IKU memiliki informasi yang cukup untuk diukur secara konsisten, dapat diverifikasi, dan tidak menimbulkan multitafsir.

No.	Komponen Metadata	Ketersediaan	Keterangan
1	Nama indikator	Ada	Sudah jelas
2	Definisi operasional	Ada	Sudah jelas
3	Formula/perhitungan	Ada	Sudah jelas
4	Satuan	Ada	Sudah jelas
5	Sumber data	Ada	Sudah jelas
6	Frekuensi pengukuran	Ada	Sudah jelas
7	Periode data	Ada	Sudah jelas
8	Unit penanggung jawab	Ada	Sudah jelas
9	Jenis indikator (outcome/output)	Ada	Sudah jelas
10	Interpretasi indikator	Ada	Sudah jelas

3.1.2 Penilaian Kualitas IKU

Penilaian kualitas IKU memperhatikan apakah indikator bersifat spesifik, terukur, relevan terhadap sasaran, berorientasi hasil, memiliki sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dikendalikan secara memadai oleh Perangkat Daerah.

IKU	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Relevansi dengan Sasaran	Hasil Evaluasi
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi/hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura (padi, jagung, bawang merah, cabai, sayur ijo, kangkung, bayam dan semangka) di Kota Denpasar dalam periode 1 (satu) tahun (ton).	$\sum (Produksi Padi + Jagung + Bawang Merah + Cabai + Sayur Ijo + Kangkung + Semangka)$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Masih relevan	Memadai
Produksi Daging	Jumlah produksi daging yang dihasilkan dari pemotongan hewan ternak (Sapi, babi, kambing dan ayam) di Kota Denpasar dalam periode 1 (satu) tahun (ton)	$\sum (Produksi Sapi + babi + kambing + ayam)$	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Masih relevan	Memadai

Kesimpulan evaluasi kualitas IKU: Dinas Pertanian : Secara prinsip, kedua IKU (Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Produksi Daging) dinilai memadai dan masih relevan karena telah berorientasi pada hasil nyata (outcome/output utama) yang menjadi urusan wajib Dinas Pertanian. Sumber data yang digunakan juga dapat dipertanggungjawabkan karena berasal langsung dari data sektoral internal dinas.

3.2 Evaluasi Capaian IKU dan Kontribusi terhadap Indikator RPJMD

3.2.1 Capaian IKU terhadap Target

Capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target. Untuk indikator dengan sifat 'semakin rendah semakin baik', metode perhitungan perlu disesuaikan dan dijelaskan dalam metadata indikator.

No.	IKU	Target	Realisasi s/d Agustus	Capaian (%)	Gap	Status
1	Produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	39.585,93	25.297,52	63,91%	-14.288,41	Belum Tercapai
2	Produksi Daging (ton)	438,74	284,78	64,91%	-153,96	Belum Tercapai

3.2.2 Analisis Tren Capaian

IKU	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tren/Kesimpulan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	39.485,28	39.585,93	39.592,19	39.601,64	39.609,59	Meningkat
Produksi Daging (ton)	434,39	438,74	443,56	448,89	454,72	Meningkat

3.2.3 Kontribusi terhadap Indikator RPJMD

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran PD	IKU PD	Capaian IKU	Analisis Kontribusi
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya produksi pertanian	1. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (ton)	25.297,52	Angka produksi ini berkontribusi terhadap Indeks Ketahanan Pangan
			2. Produksi Daging (ton)	284,78	

Dinas Pertanian Kota Denpasar tetap konsisten menjalankan perannya sebagai penggerak utama sektor ketersediaan pangan daerah. Realisasi berjalan hingga bulan Agustus 2026 yang mencakup **25.297,52 ton** komoditas tanaman pangan/hortikultura serta **284,78 ton** produksi

daging merupakan komponen bahan baku utama yang mengamankan tren positif capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD.

Meskipun secara administratif status pada bulan Agustus tertulis "Belum Tercapai" karena belum menyentuh akhir siklus panen tahunan, persentase progres yang telah melewati angka **63% hingga 64%** menunjukkan bahwa intervensi program kedinasan berada pada jalur yang tepat (*on-track*). Tanpa adanya pengawalan ketat terhadap angka produksi berjalan ini, pilar ketersediaan pangan pada skor IKP agregat Kota Denpasar akan langsung terdegradasi dan memicu lonjakan kerentanan pangan akibat ketergantungan penuh pada pasokan luar daerah

3.3 Evaluasi Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Mendukung IKU

IKU	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Hubungan dengan IKU	Hasil Evaluasi
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Langsung	Masih relevan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Langsung	Masih relevan
Produksi Daging	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Langsung	Masih relevan
Produksi Daging	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Langsung	Masih relevan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Langsung	Masih relevan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Langsung	Masih relevan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Langsung	Masih relevan

IKU	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Hubungan dengan IKU	Hasil Evaluasi
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Langsung	Masih relevan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Langsung	Masih relevan
Produksi Daging	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Langsung	Masih relevan
Produksi Daging	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Langsung	Masih relevan
Produksi Daging	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Langsung	Masih relevan
Produksi Daging	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Langsung	Masih relevan
Produksi Daging	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Langsung	Masih relevan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Langsung	Masih relevan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan izin Usaha Pertanian	Langsung	Masih relevan

IKU	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Hubungan dengan IKU	Hasil Evaluasi
Produksi Daging	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan; Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Langsung	Masih relevan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Langsung	Masih relevan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Langsung	Masih relevan
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Langsung	Masih relevan

Berdasarkan hasil pemetaan matriks intervensi terhadap 2 (dua) IKU makro Dinas Pertanian Kota Denpasar, analisis kesesuaian dirumuskan melalui 6 (enam) aspek parameter evaluasi berikut:

1. Kejelasan Hubungan Program dengan IKU

Seluruh program yang diampu oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar telah menunjukkan garis hubungan kausalitas yang vertikal-terhadap pencapaian target IKU. IKU Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipacu secara integratif oleh komponen sarana (benih/teknologi spesifik lokasi), prasarana (infrastruktur fisik lahan), proteksi kebencanaan (pengendalian OPT), regulasi (perizinan usaha), serta penguatan kapasitas SDM (penyuluhan). IKU Produksi Daging dikunci secara fokus oleh Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet guna meminimalkan morbidity/mortality rate pada komoditas ternak potong, didukung oleh pengelolaan sarana bibit ternak, regulasi izin fasilitas pemeliharaan, serta hilirisasi infrastruktur berupa Rumah Potong Hewan (RPH).

2. Relevansi Kegiatan/Subkegiatan dengan Sasaran.

Setiap subkegiatan didesain sebagai variabel pemicu (driver factor) langsung.

3. Duplikasi Intervensi dan Efisiensi Struktur

Pengelompokan urusan telah dikunci secara tegas per baris IKU. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura difokuskan pada pengawalan siklus budidaya, irigasi, dan penanganan pascapanen. Komoditas peternakan difokuskan pada pengadaan bibit ternak, peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT), dan pengawasan sirkulasi produk karkas di hilir. Pemisahan pelaporan subkegiatan sarana (Program 3.27.02) antara klaster hortikultura dan klaster peternakan di dalam tabel menunjukkan pembagian batas kendali fungsional yang tajam pada masing-masing bidang pengampu.

4. Kecukupan Intervensi pada IKU Strategis (Adequacy of Intervention)

Intervensi yang dirancang untuk mendukung pencapaian target makro dipastikan telah memadai karena mengkombinasikan pendekatan fisik (hard intervention) dan non-fisik (soft intervention): Pengadaan fisik jalan usaha tani dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan yang higienis diimbangi dengan intervensi non-fisik strategis seperti Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani, pembinaan standar perizinan usaha, serta skema Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis. Kombinasi hulu-hilir ini memastikan IKU dikawal secara komprehensif guna meredam potensi kegagalan panen dan wabah penyakit di wilayah perkotaan (urban farming).

5. Keselarasan Alokasi Sumber Daya dan Anggaran dengan Prioritas IKU

Formulasi program dalam dokumen perencanaan ini telah sejalan dengan prioritas daerah. Hal ini mencerminkan komitmen dinas untuk memprioritaskan anggaran pada fungsi-fungsi pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan stabilitas ketahanan pangan lokal masyarakat Kota Denpasar.

6. Identifikasi Dukungan Lintas Perangkat Daerah (Cross-Cutting)

Dokumen evaluasi ini mengidentifikasi kebutuhan koordinasi cross-cutting bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Denpasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Denpasar, Bapenda Kota Denpasar dan TPID Kota Denpasar.

Namun demikian, dari aspek perubahan regulasi perencanaan terbaru, khususnya penyelarasan nomenklatur berdasarkan Kepmendagri No. 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dinamika pengalihan kewenangan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang kini sepenuhnya di bawah otoritas Pemerintah

Pusat (Kementerian Pertanian), maka perubahan status Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjadi pegawai pusat menciptakan implikasi logis pada lembar kerja hubungan kausalitas dengan pemerintah daerah. Secara yuridis formal, **Program Penyuluhan Pertanian (3.27.07)** beserta sub-aktivitasnya tetap ditetapkan sebagai urusan pemerintahan wajib yang melekat pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, struktur rancangan arsitektur program dalam dokumen perencanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar telah sepenuhnya selaras secara legal dengan Kepmendagri terbaru. Akan tetapi ada 2 sub kegiatan yang sudah **tidak selaras dan tidak digunakan lagi** pada Kepmendagri terbaru, yaitu :

1. Sub Kegiatan 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
2. Sub 3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara (BA) Kesepakatan Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dalam Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) untuk Tahun Anggaran 2027 antara Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian), Pemerintah Provinsi Bali (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), dan Pemerintah Kota Denpasar (Dinas Pertanian) pada tanggal 4 Mei 2026, ditetapkan klaster komitmen penyelarasan indikator prioritas nasional dan daerah. Hasil pembahasan desk tersebut dievaluasi dan diintegrasikan ke dalam arsitektur program dan subkegiatan Dinas Pertanian Kota Denpasar yang mengamanatkan bahwa target makro daerah wajib mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN), khususnya pilar Ketahanan Pangan Nasional. Ada (4) sub kegiatan baru yang wajib dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan daerah :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
3	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
4	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa

3.4 Evaluasi Keselarasan Hubungan Kinerja dalam Pohon Kinerja

Evaluasi pohon kinerja dilakukan untuk melihat kesesuaian hubungan antara sasaran Perangkat Daerah dengan kinerja pada level di bawahnya serta memastikan adanya hubungan sebab-akibat yang logis.

Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025–2029, sasaran utama yang ditetapkan adalah **“Meningkatnya Produksi Pertanian”** dengan indikator **Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura** serta **Produksi Daging**. Sasaran tersebut selaras dengan core business Dinas Pertanian dalam penyelenggaraan urusan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh beberapa kinerja antara, antara lain peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan kelahiran ternak, penurunan angka kematian ternak/hewan, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kualitas SDM pertanian, serta pengendalian penyakit hewan.

Matriks Evaluasi Keselarasan Hubungan Kinerja

Kinerja Atas	Kinerja Bawah	Hubungan Sebab-Akibat	Penilaian Keselarasan	Catatan
Misi RPJMD Ke-2: Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas Ketahanan Pangan	SASARAN: Meningkatnya Produksi Pertanian	Cukup	Perlu Penyempurnaan	Sasaran Dinas Pertanian secara langsung mengintervensi pilar "Ketahanan Pangan" yang diamanatkan dalam Misi ke-2 RPJMD Kota Denpasar. Akan tetapi melakukan reposisi sasaran dari yang semula berorientasi pada kuantitas fisik (produksi) menjadi berorientasi pada kesejahteraan ekonomi (Benefit B/C Ratio) adalah langkah mitigasi perencanaan yang sangat logis dan strategis untuk daerah urban seperti Kota Denpasar. Ketika lahan pertanian terus menyusut akibat alih fungsi lahan, mengejar total volume produksi secara agregat menjadi target yang hampir mustahil dicapai. Namun, dengan mengubah fokus ke Kesejahteraan Petani, Dinas Pertanian tetap bisa dinilai berkinerja baik jika mampu membuat sisa lahan yang ada menjadi jauh lebih produktif, efisien, dan menghasilkan

Kinerja Atas	Kinerja Bawah	Hubungan Sebab-Akibat	Penilaian Keselarasan	Catatan
				keuntungan finansial yang tinggi bagi petani.
SASARAN: Meningkatnya Produksi Pertanian	Outcome Level 1: Meningkatnya Produktivitas; Meningkatnya IP; Peningkatan Kelahiran; Penurunan Angka Kematian Ternak	Kuat	Selaras	Peningkatan aspek produktivitas, indeks pertanaman, dan populasi ternak secara logis mendorong total produksi pertanian.
Outcome Level 1: Meningkatnya Produktivitas	Outcome Level 2: Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Padi; Diversifikasi Usaha Tani; Terjaminnya Kepastian Usaha	Kuat	Selaras	Kombinasi dari penerapan benih unggul, teknologi tepat guna, perluasan areal diversifikasi, dan perlindungan asuransi (AOTP) menjadi pendorong utama peningkatan produktivitas hasil per hektar.
Outcome Level 1: Meningkatnya IP (Indeks Pertanaman)	Outcome Level 2: Ketersediaan Sarana Pertanian; Ketersediaan Prasarana Pertanian	Kuat	Selaras	Peningkatan frekuensi tanam (IP) sangat bergantung pada kesiapan jaringan irigasi dan mekanisasi pertanian (alsintan) yang tepat guna.
Outcome Level 1: Meningkatnya Kapasitas Kelompok Tani	Outcome Level 2: Terwujudnya kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang peningkatan nilai tambah produk pertanian; Terwujudnya Kelompok Tani/Usaha di bidang Pertanian/Peternakan yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berbadan Hukum/Memiliki Legalitas Usaha	Kuat	Selaras	Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani dicapai melalui penguatan legalitas usaha, kemandirian kelompok, serta edukasi hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah produk.
Outcome Level 1: Peningkatan Kelahiran	Outcome Level 2: Peningkatan ketersediaan sarana peternakan; Peningkatan Pemahaman SDM Peternakan	Cukup	Perlu Penyempurnaan	Target peningkatan kelahiran komoditas sapi dan babi didukung secara linear oleh capaian indikator persentase kebuntingan hasil layanan Inseminasi Buatan (IB); namun perlu diperhatikan untuk peningkatan kelahiran terkendala akibat alih fungsi lahan, sehingga sebaiknya turun menjadi outcome level 2
Outcome Level 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Hewan	Outcome Level 2: Terwujudnya pengendalian penyakit hewan menular strategis; Terwujudnya kondisi produk asal hewan dan hasil asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH)	Cukup	Perlu Penyempurnaan	Intervensi hulu (pengendalian penyakit menular via vaksinasi) berkorelasi kuat dengan penurunan kematian hewan. Namun, intervensi hilir (produk ASUH pada RPH/peredaran) ditujukan untuk aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet/manusia), bukan untuk mencegah kematian ternak hidup di peternak

3.4.1 Aspek yang Diuji

Evaluasi pohon kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar dilakukan secara objektif dengan menguji lima aspek kritikal sebagai berikut:

1. **Cascading:** Menguji ketepatan penurunan sasaran dan indikator dari level makro Kepala Daerah (RPJMD) ke level Sasaran Strategis Perangkat Daerah, hingga

dijabarkan ke level Program (Outcome Level 1), Kegiatan (Outcome Level 2), dan Subkegiatan (Output Level 3). Penurunan target kinerja pada dokumen awal dinilai tidak tepat karena memaksa unit di bawahnya mengejar target volume produksi makro (tonase), di mana input utamanya (luas lahan sawah) terus tergerus alih fungsi lahan perkotaan.

2. **Logical Framework:** *Menguji kelogisan hubungan sebab-akibat (cause-and-effect relationship) antara input (anggaran/sumber daya), aktivitas, output subkegiatan, dan outcome program dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Struktur hubungan sebab-akibat kurang tepat. Penambahan kuantitas input teknologi (benih, pupuk, alsintan) tidak akan otomatis menaikkan total produksi daerah jika bentang lahan pertanian menyusut secara masif*
3. **Missing Link:** *Mendeteksi keberadaan mata rantai kinerja atau indikator antara yang terputus atau hilang, sehingga menghambat proses pencapaian tujuan dari level operasional di bawah ke level strategis di atasnya. Terdapat missing link antara akar masalah nomor 1 (Biaya produksi berusaha tani tinggi) dan nomor 2 (Rendahnya pendapatan petani) dengan rumusan Sasaran Utama. Tidak ada satu pun indikator di level sasaran maupun program makro yang mengukur variabel keuangan/pendapatan bersih pelaku utama*
4. **Redundancy:** *Mengidentifikasi adanya duplikasi, tumpang tindih intervensi, atau pengulangan indikator kinerja yang sejenis di beberapa lini berbeda yang tidak memberikan nilai tambah (value added) bagi efisiensi organisasi.. Terjadi duplikasi dan ketidakefisienan struktur indikator pada sektor peternakan, di mana aspek Peningkatan Kelahiran dan Penurunan Angka Kematian Ternak dipisah menjadi dua urusan program yang berbeda*
5. **Cross-cutting:** *Memeriksa apakah dukungan, ketergantungan, dan koordinasi kerja lintas Perangkat Daerah (OPD) maupun aktor eksternal telah dipetakan secara jelas pada pohon kinerja guna meminimalkan ego sektoral. Pohon kinerja belum memetakan peran lintas aktor secara optimal untuk membentengi sektor pertanian dari dampak alih fungsi lahan.*

3.4.2 Hasil Evaluasi Pohon Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi komparatif, struktur hubungan horizontal pada level operasional bawah secara teknis sektoral sudah berjalan selaras pada kedua model bagan. Ditemukan mata rantai yang masih lemah yaitu kelemahan mendasar pada struktur pohon kinerja terletak pada ketidakmampuan sasaran utama (Meningkatnya

Produksi Pertanian) dalam menahan atau merespons realita **alih fungsi lahan perkotaan di Kota Denpasar**. Menetapkan target berbasis volume (tonase) di tengah penyusutan lahan baku sawah yang masif secara tahunan menciptakan target yang mustahil dicapai, sehingga rapor SAKIP organisasi akan selalu terbebani oleh deviasi capaian di luar kendali teknis. Selain itu, program kesehatan hewan terfragmentasi secara tidak efisien.

3.5 Rekapitulasi Hasil Evaluasi

Sebagai bentuk ringkasan komprehensif atas seluruh rangkaian pengujian akuntabilitas kinerja yang dilakukan pada bab ini, berikut disajikan matriks Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar

No.	Aspek Evaluasi	Temuan Utama	Status	Prioritas Tindak Lanjut
1	Kualitas IKU dan metadata	IKU saat ini adalah produksi pertanian, ketika variabel input utama yaitu luas lahan terus mengalami penyusutan di luar kendali teknis instansi, maka penetapan sasaran jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan volume total produksi (tonase) agregat menjadi tidak logis dan tidak realistis untuk dicapai	Perlu Perbaikan	Perlu mengubah IKU kuantitas fisik produksi menjadi IKU dengan kualitas Nilai Ekonomi/Kesejahteraan
2	Capaian IKU dan kontribusi RPJMD	Target kuantitas produksi makro pada dokumen lama rentan gagal akibat penyusutan lahan baku sawah	Perlu perbaikan	Menetapkan angka baseline akurat
3	Kesesuaian program/kegiatan/subkegiatan	Penyelarasan program/kegiatan/subkegiatan perlu dilakukan. Hasil BA Rakortekbang 2027 dan Kepmendagri No. 900.1-861 Tahun 2026 mewajibkan penghapusan 2 subkegiatan lama serta penambahan 4 subkegiatan baru.	Perlu Perbaikan	Menghapus 2 (dua) sub kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang sudah tidak sesuai dengan Kepmendagri No. 900.1-861 Tahun 2026 dan menggantinya dengan Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian serta menambah 4 sub kegiatan baru sebagai hasil BA Rakortekbang
4	Keselarasan pohon kinerja	Penyelarasan pohon kinerja dengan sasaran yang mengarah pada kesejahteraan petani	Perlu penyempurnaan	Melakukan penyempurnaan pohon kinerja dengan memperjelas hubungan sebabakibat antarlevel kinerja

BAB IV PERMASALAHAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA

4.1 Permasalahan Pencapaian IKU

Meskipun target akumulatif IKU makro pada tahun berjalan (2026) secara administratif berstatus **Tercapai** (Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 100,36% dan Produksi Daging sebesar 100,001%), namun eksistensi keberlanjutan capaian tersebut dihadapkan pada ancaman dan permasalahan struktural yang sangat krusial, antara lain:

1. **Disrupsi Masif Alih Fungsi Lahan Perkotaan** : Permasalahan utama yang paling mendasar adalah terjadinya degradasi lahan pertanian subur produktif yang sangat signifikan di Kota Denpasar, yaitu mencapai 256 Hektar dari rentang tahun 2025 ke tahun 2026. Laju konversi lahan horizontal yang tinggi mereduksi *luas panen efektif*, sehingga mempersulit dinas dalam mempertahankan tren kenaikan angka produksi pada tahun-tahun berikutnya.
2. **Fluktuasi Biaya Operasional** : Tingginya biaya sarana produksi (biaya berusaha tani) dan logistik lapangan yang tidak sebanding dengan kepastian harga jual komoditas di tingkat hulu, sehingga menurunkan minat petani mempertahankan lahannya.

4.2 Faktor Pendorong

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan penyesuaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah antara lain:

1. **Regulasi Perlindungan Lahan:** Adanya komitmen daerah terkait regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan RTRW Kota Denpasar untuk membatasi zonasi alih fungsi lahan.
2. **Dukungan Anggaran dan Prasarana:** Ketersediaan pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik pelindung, seperti jalan usaha tani (JUT) dan perbaikan jaringan irigasi usaha tani
3. **Inovasi dan Proteksi:** Penerapan sistem Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang meminimalkan risiko kerugian total (total loss) akibat gagal panen atau bencana alam.

4.3 Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menghambat pencapaian sasaran institusi pada model perencanaan awal meliputi:

1. **Target yang Tidak Realistis:** Menetapkan target pertumbuhan tonase produksi tahunan di tengah tren penciutan lahan baku sawah merupakan kesalahan asumsi perencanaan (*planning fallacy*).

2. **Indikator yang Kurang Tepat:** *IKU eksisting hanya menghitung output kuantitas fisik, sehingga memunculkan missing link karena tidak mampu mengukur tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi riil petani perkotaan.*

4.4 Analisis Gap

IKU	Target	Realisasi	Gap	Penyebab Utama	Risiko/Dampak
<i>Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (ton)</i>	39.393,08	39.537,05	+143,97	<i>Meskipun Gap dinyatakan positif tetapi lahan sawah di Kota Denpasar dibayangi oleh alih fungsi lahan yang sangat massif. Lahan baku sawah terus berkurang akibat alih fungsi lahan perkotaan yang tidak terkendali</i>	<i>Rapor SAKIP organisasi dinilai kurang optimal akibat target fisik di luar kendali teknis dinas</i>
<i>Produksi Daging (ton)</i>	413,28	413,29	+0,01	<i>Fragmentasi program urusan peternakan pada pohon kinerja lama yang tidak terintegrasi dengan baik</i>	<i>Penilaian efektivitas intervensi kesehatan hewan dan output peternakan menjadi bias</i>

BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1 Rekomendasi Perbaikan IKU

Temuan	IKU Eksisting	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKU berbasis kuantitas fisik tidak realistis dicapai dan tidak sensitif terhadap isu kesejahteraan petani di tengah tekanan alih fungsi lahan.	1. Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Produksi Daging	Menghapus IKU eksisting dan menggantinya dengan IKU yang mengukur nilai efisiensi ekonomi usaha	Mengadopsi indikator Benefit Cost (B/C) Ratio pendapatan dan biaya berusaha tani sebagai IKU Sasaran Strategis Dinas yang baru

5.2 Rekomendasi Target Kinerja

1. *Target Volume Produksi Fisik (Lama): Direkomendasikan untuk dikoreksi/diturunkan dari level Sasaran Strategis dan direposisi hanya sebagai indikator operasional sekunder pada tingkat bidang teknis.*
2. *Target Indikator Benefit Cost (B/C) Ratio (Baru): Direkomendasikan untuk ditetapkan target indeks > 1,0. Angka ini harus diselaraskan secara periodik dengan baseline hasil survei struktur biaya usaha tani komoditas unggulan daerah. Target ini diarahkan untuk ditingkatkan secara bertahap guna memastikan usaha pertanian perkotaan tetap menguntungkan dan menarik bagi generasi pelaku utama berikutnya.*

5.3 Rekomendasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Temuan	Rekomendasi	Arah Tindak Lanjut
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Relevan	Pertahankan	-
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Relevan	Pertahankan	-
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Relevan	Pertahankan	-
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Relevan	Pertahankan	-
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Relevan	Pertahankan	-
3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Relevan	Pertahankan	-
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Relevan	Pertahankan	-
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Relevan	Pertahankan	-

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Temuan	Rekomendasi	Arah Tindak Lanjut
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Relevan	Pertahankan	-
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	Relevan	Pertahankan	-
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Tambahan	Tambahan	Perlu ditambahkan Sesuai dengan Berita Acara (BA) Kesepakatan Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dalam Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Rakortekbang
3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Relevan	Pertahankan	-
3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Relevan	Pertahankan	-
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Tambahan	Tambahan	Perlu ditambahkan Sesuai dengan Berita Acara (BA) Kesepakatan Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dalam Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Rakortekbang
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	Relevan	Pertahankan	-
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Relevan	Pertahankan	-
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Relevan	Pertahankan	-
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Relevan	Pertahankan	-
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Relevan	Pertahankan	-
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Relevan	Pertahankan	-
3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Relevan	Pertahankan	-
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Relevan	Pertahankan	-
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Relevan	Pertahankan	-
3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Relevan	Pertahankan	-
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Relevan	Pertahankan	-
3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Relevan	Pertahankan	-

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Temuan	Rekomendasi	Arah Tindak Lanjut
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Relevan	Pertahankan	-
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Relevan	Pertahankan	-
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Relevan	Pertahankan	-
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Relevan	Pertahankan	-
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Relevan	Pertahankan	-
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Relevan	Pertahankan	-
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Relevan	Pertahankan	-
3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Relevan	Pertahankan	-
3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Relevan	Pertahankan	-
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Relevan	Pertahankan	-
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Relevan	Pertahankan	-
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kurang Relevan	Perlu diganti	Fokus anggaran diarahkan untuk memfasilitasi pelatihan petani karena perubahan status kepegawaian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke Pemerintah Pusat
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Tidak relevan	Perlu diganti	Sudah tidak ada Kepmendagri No. 900.1-861 Tahun 2026
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak relevan	Perlu diganti	Sudah tidak ada Kepmendagri No. 900.1-861 Tahun 2026
3.27.07.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Tambahan	Tambahan	Perlu ditambahkan Sesuai dengan Berita Acara (BA) Kesepakatan Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dalam Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Rakortekbang
3.27.07.2.01.0016 - Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Tambahan	Tambahan	Perlu ditambahkan Sesuai dengan Berita Acara (BA) Kesepakatan Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dalam Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Rakortekbang

5.4 Rekomendasi Perbaikan Pohon Kinerja

Diperlukan rekonstruksi total terhadap dokumen pohon kinerja organisasi dengan arah sebagai berikut:

1. **Perubahan Rumusan Sasaran Utama:** Mengubah rumusan sasaran dari "Meningkatnya Produksi Pertanian" menjadi "**Meningkatnya Pendapatan Petani**" untuk menjawab langsung Isu Strategis Nomor 1 dan 2.
2. **Penguatan Hubungan Kausalitas Vertikal:** Memposisikan seluruh Outcome Program (Produktivitas, IP, Kapasitas Poktan, Kesehatan Hewan) sebagai variabel penentu penguat komponen keuntungan (Benefit) dan penekan komponen pengeluaran modal (Cost) dalam struktur perhitungan matematis indeks B/C Ratio.
3. **Penyempurnaan Rantai Kinerja:** Memasukkan lampiran Pohon Kinerja baru (sesuai bagan Gambar 2) yang logis, runtut, serta bersih dari tumpang tindih indikator sektoral.

5.5 Rencana Tindak Lanjut

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu	Dokumen yang Disesuaikan
1	Indikator sasaran berbasis kuantitas fisik (tonase) tidak lagi logis karena dampak alih fungsi lahan	Reorientasi sasaran ke arah kesejahteraan finansial pelaku utama pertanian perkotaan.	Mengganti sasaran dan menerapkan indikator baru Benefit Cost (B/C) Ratio.	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Triwulan IV Tahun 2026	Renstra Perubahan 2025-2029, Perjanjian Kinerja (PK), Pohon Kinerja
2	Duplikasi struktur indikator program pada urusan bidang kesehatan hewan.	Konsolidasi struktur indikator program peternakan agar lebih efisien.	Menggabungkan kluster program peternakan ke dalam satu Outcome Program Kesmavet terpadu.	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Triwulan IV Tahun 2026	Dokumen Cascading Pohon Kinerja Perubahan
3	Belum tersedianya instrument pengukuran komponen B/C Ratio.	Menyusun panduan teknis pengukuran B/C ratio usaha tani.	Menuangkan target B/C ratio ke dalam dokumen	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Triwulan IV Tahun 2026	Renstra Perubahan 2025-2029, Perjanjian Kinerja (PK), Pohon Kinerja

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang komparatif, disimpulkan bahwa kualitas IKU awal dinilai **kurang memadai** karena mematok target kuantitas fisik (produksi makro) yang bertentangan dengan realita lapangan berupa masifnya laju **alih fungsi lahan** perkotaan di Kota Denpasar. Hal ini mengakibatkan capaian target sasaran institusi terancam gagal dan tidak mencerminkan kontribusi yang akurat terhadap pemenuhan Misi Ke-2 RPJMD Kota Denpasar.

Melalui proses evaluasi ini, Dinas Pertanian telah mengambil langkah korektif strategis dengan mengubah sasaran menjadi **"Meningkatnya Pendapatan Petani"** didukung indikator **Benefit Cost (B/C) Ratio** pendapatan dan biaya berusaha tani. Logika intervensi ini dinilai jauh lebih **selaras, logis, dan responsif**. Peningkatan efisiensi ekonomi usaha tani bertindak sebagai proteksi/insentif alami bagi petani agar secara mandiri mempertahankan sisa lahan pertanian yang dikelolanya. Isu paling penting yang harus segera ditindaklanjuti adalah pengesahan formal dokumen pohon kinerja perubahan serta penyusunan instrumen survei lapangan untuk mengukur komponen angka *B/C Ratio* tersebut.

6.2 Tindak Lanjut

Hasil evaluasi komparatif pohon kinerja ini akan dipergunakan secara resmi sebagai bahan dasar perbaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahunan, penataan ulang arsitektur program/kegiatan/subkegiatan, dasar pengalokasian anggaran berbasis kinerja, serta menjadi landasan utama bagi penyempurnaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pertanian Kota Denpasar Periode 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

LAMPIRAN

Lampiran sekurang-kurangnya memuat:

1. *Matriks Evaluasi Capaian Renstra / Formulir evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Matriks Metadata IKU.*
3. *Matriks Evaluasi Kualitas IKU.*
4. *Matriks Cascading RPJMD - Renstra - IKU.*
5. *Matriks IKU - Program - Kegiatan - Subkegiatan.*
6. *Pohon Kinerja Eksisting dan hasil penyempurnaan.*
7. *Matriks Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.*

LAMPIRAN 1. MATRIKS EVALUASI CAPAIAN RENSTRA

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
1	Meningkatnya Pendapatan Petani	Benefit Cost (B/C) Ratio Usaha Tani	1,805	1,808	1,811	100,17			Dinas Pertanian	-
2	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						25.693.704.070		Dinas Pertanian	-
	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.337.267.080		Dinas Pertanian	-
	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100,00	100,00			18.337.267.080		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.045.787.800		Dinas Pertanian	-
	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52,00	97,00			15.045.787.800		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.045.787.800		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52,00	97,00			15.045.787.800		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						529.926.000		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Komponen/ Peralatan/ Bahan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00			529.926.000		Dinas Pertanian	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00					Dinas Pertanian	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00					Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00					Dinas Pertanian	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	11,00	12,00					Dinas Pertanian	-
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	99,00	99,00					Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.496.000		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00			6.496.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.140.000		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00			15.140.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						355.728.000		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00			355.728.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						60.550.000		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12,00	12,00			60.550.000		Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
	3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.692.000		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	99,00	99,00			10.692.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						81.320.000		Dinas Pertanian	-
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	11,00	12,00			81.320.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						495.165.000		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	20,00			495.165.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						495.165.000		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	20,00			495.165.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.546.227.280		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Administrasi Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00			1.546.227.280		Dinas Pertanian	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00					Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
	3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						113.320.000		Dinas Pertanian	-
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	12,00			113.320.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						420.000.000		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00			420.000.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.012.907.280		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00			1.012.907.280		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						720.161.000		Dinas Pertanian	-
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	55,00	55,00			720.161.000		Dinas Pertanian	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4,00	4,00					Dinas Pertanian	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	86,00	86,00					Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						416.221.000		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55,00	55,00			416.221.000		Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)								
	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						223.800.000		Dinas Pertanian	-
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4,00	4,00			223.800.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						80.140.000		Dinas Pertanian	-
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	86,00	86,00			80.140.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.643.274.000		Dinas Pertanian	-
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan produksi ternak	Produktivitas Padi (Kw/ha)	79,19	79,48			1.643.274.000		Dinas Pertanian	-
		Produktivitas Jagung (Kw/ha)	0,00	102,01					Dinas Pertanian	-
		Produktivitas Bawang Merah (Kw/ha)	205,13	217,55					Dinas Pertanian	-
		Produktivitas Cabai (Kw/ha)	37,43	40,99					Dinas Pertanian	-
		Produktivitas Sayur Hijau (Kw/ha)	176,45	183,66					Dinas Pertanian	-
		Produktivitas Kangkung (Kw/ha)	152,34	159,00					Dinas Pertanian	-
		Produktivitas Bayam (Kw/ha)	57,62	59,45					Dinas Pertanian	-
		Produktivitas Semangka (Kw/ha)	333,43	317,90					Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
		Kelahiran Sapi (Ekor)	1.582,00	900,00					Dinas Pertanian	-
		Kelahiran Babi (Ekor)	0,00	5.000,00					Dinas Pertanian	-
	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						1.009.211.000		Dinas Pertanian	-
	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	12,00	12,00			1.009.211.000		Dinas Pertanian	-
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	6,00	7,00					Dinas Pertanian	-
	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						316.987.000		Dinas Pertanian	-
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	12,00	12,00			316.987.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						692.224.000		Dinas Pertanian	-
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	6,00	7,00			692.224.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						634.063.000		Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Memenuhi Standar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	12,00	12,00			634.063.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan						634.063.000		Dinas Pertanian	-
	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	12,00	12,00			634.063.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						0		Dinas Pertanian	-
	Peningkatan Kelahiran Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	60,00	100,00			0		Dinas Pertanian	-
	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						0		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	60,00	100,00			0		Dinas Pertanian	-
	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						3.924.613.900		Dinas Pertanian	-
	Meningkatnya prasarana pertanian yang berkondisi baik	Prosentase Prasarana Pertanian yang dikendalikan dan dimanfaatkan (%)	100,00	100,00			3.924.613.900		Dinas Pertanian	-
	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian						0		Dinas Pertanian	-
	Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil yang dimanfaatkan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	4,00	4,00			0		Dinas Pertanian	-
		Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang	0,00	4,00					Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
		dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)								
	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan						0		Dinas Pertanian	-
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	4,00	4,00			0		Dinas Pertanian	-
	3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura						0		Dinas Pertanian	-
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0,00	4,00			0		Dinas Pertanian	-
	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian						3.924.613.900		Dinas Pertanian	-
	Jumlah Prasarana Pertanian yang ber kondisi baik	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2,00	2,00			3.924.613.900		Dinas Pertanian	-
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	5,00	2,00					Dinas Pertanian	-
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2,00	2,00					Dinas Pertanian	-
	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						841.920.000		Dinas Pertanian	-
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2,00	2,00			841.920.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						2.275.280.000		Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	5,00	2,00			2.275.280.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan						807.413.900		Dinas Pertanian	-
	Terbangun, terahabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2,00	2,00			807.413.900		Dinas Pertanian	-
	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						1.048.431.590		Dinas Pertanian	-
	Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (%)	-37,00	5,00			1.048.431.590		Dinas Pertanian	-
	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						838.198.900		Dinas Pertanian	-
	Cakupan vaksinasi hewan	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0,00	8,00			838.198.900		Dinas Pertanian	-
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12,00	12,00					Dinas Pertanian	-
	3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis						0		Dinas Pertanian	-
	Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0,00	8,00			0		Dinas Pertanian	-
	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						838.198.900		Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12,00	12,00			838.198.900		Dinas Pertanian	-
	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						88.928.000		Dinas Pertanian	-
	Produk Hewan yang beredar aman untuk dikonsumsi	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	12,00	12,00			88.928.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan						88.928.000		Dinas Pertanian	-
	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	12,00	12,00			88.928.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						121.304.690		Dinas Pertanian	-
	Pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	12,00	12,00			121.304.690		Dinas Pertanian	-
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	12,00	12,00					Dinas Pertanian	-
	3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium						0		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	12,00	12,00			0		Dinas Pertanian	-
	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						121.304.690		Dinas Pertanian	-
	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	12,00	12,00			121.304.690		Dinas Pertanian	-
	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						173.362.000		Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Tanaman Pangan) (%)	2,50	2,50			173.362.000		Dinas Pertanian	-
		Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Hortikultura) (%)	5,00	5,00					Dinas Pertanian	-
	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						173.362.000		Dinas Pertanian	-
	Serangan OPT yang dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2,00	2,00			173.362.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						173.362.000		Dinas Pertanian	-
	Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2,00	2,00			173.362.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						0		Dinas Pertanian	-
	Meningkatnya rekomendasi Izin Usaha Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian yang difasilitasi (%)	100,00	100,00			0		Dinas Pertanian	-
	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						0		Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
	Rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	4,00	4,00			0		Dinas Pertanian	-
	3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						0		Dinas Pertanian	-
	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	4,00	4,00			0		Dinas Pertanian	-
	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						0		Dinas Pertanian	-
	Rekomendasi izin usaha medik veteriner yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	0,00	12,00			0		Dinas Pertanian	-
	3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan						0		Dinas Pertanian	-
	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	0,00	12,00			0		Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						566.755.500		Dinas Pertanian	-
	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian	Persentase peningkatan skor kelas kelompok tani (%)	10,00	10,00			566.755.500		Dinas Pertanian	-
	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						566.755.500		Dinas Pertanian	-
	Peningkatan pengetahuan kelompok tani di bidang pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0,00	6,00			566.755.500		Dinas Pertanian	-
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	4,00	4,00					Dinas Pertanian	-
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	16,00	16,00					Dinas Pertanian	-
	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						111.592.000		Dinas Pertanian	-
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	4,00	4,00			111.592.000		Dinas Pertanian	-
	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						455.163.500		Dinas Pertanian	-
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	16,00	16,00			455.163.500		Dinas Pertanian	-

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Baseline	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Anggaran Target	Anggaran Realisasi	Penanggung Jawab	Catatan
	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota						0		Dinas Pertanian	-
	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0,00	6,00			0		Dinas Pertanian	-

LAMPIRAN 2. MATRIKS METADATA IKU

IKU	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Sumber Data	Frekuensi	Unit Pengampu	Interpretasi
Benefit Cost (B/C) Ratio Usaha Tani	Perbandingan antara total pendapatan kotor yang diterima petani dengan total biaya modal operasional yang dikeluarkan dalam satu siklus usaha tani di wilayah Kota Denpasar	$\text{Total Pendapatan Usaha Tani (Rp)} / \text{Total Biaya Produksi Usaha Tani (Rp)}$	Angka	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Tahunan	Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil	Semakin tinggi (>1,0), semakin menguntungkan. Angka >1,0 menandakan usaha tani sangat efisien secara ekonomi dan layak dipertahankan dari alih fungsi lahan.

LAMPIRAN 3. MATRIKS CASCADING RPJMD - RENSTRA - IKU - INTERVENSI

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra PD	IKU PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Pengampu
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Meningkatnya Pendapatan Petani	Benefit Cost (B/C) Ratio Usaha Tani	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra PD	IKU PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Pengampu
				SARANA PERTANIAN		Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
						3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		
						3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
					3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
						3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang	

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra PD	IKU PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Pengampu
						<i>Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	
				3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
					3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian		
						3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
						3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
						3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
						3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian	

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra PD	IKU PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Pengampu
						<i>Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota</i>	
					3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian		
						3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
						3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
						3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
				3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra PD	IKU PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Pengampu
					3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		
						3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	
						3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		
						3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra PD	IKU PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Pengampu
					3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
						3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
						3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
					3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
						3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra PD	IKU PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Pengampu
						Hortikultura, dan Perkebunan	
				3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
					3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
						3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
					3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		
						3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik	

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran Renstra PD	IKU PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Unit Pengampu
						<i>Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan</i>	
				3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
					3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
						3.27.07.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
						3.27.07.2.01.0016 - Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	